KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Agar Bencana Tidak Terulang Izin Tambang di Wilayah Sukabumi Harus Dievaluasi
Tanggal : Selasa, 17 Desember 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Agar Bencana Tidak Terulang

Izin Tambang Di Wilayah Sukabumi Mesti Dievaluasi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) diminta mengevaluasi izin tambang di Kabupaten Sukabumi. Pasalnya, kegitan tersebut diduga menjadi pemicu banjir dan tanah longsor yang telah merenggut jiwa, awal Desember lalu.

WAKIL Ketua DPR Saan Mustopa menegaskan, salah satu penyebab munculnya bencana adalah kerusakan lingkungan.

Menurutnya, aktivitas tambang di wilayah Kabupaten Sukabumi ditengarai menjadi salah satu pemicu banjir dan tanah longsor, hingga harus dilakukan evaluasi.

"Perizinan tambang dan penebangan hutan yang berisiko merusak lingkungan harus dievaluasi ulang. Upaya ini wajib dilakukan agar bencana serupa tidak terulang di musim penghujan ini atau di masa mendatang," ujar Saan di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Politisi Partai NasDem ini mengingatkan, kerusakan lingkungan tidak hanya merusak ekosistem, tapi juga mengancam keselamatan warga. Dia berharap ada evaluasi yang dapat mencegah bencana serupa di masa mendatang.

"Ini tanggung jawab kita bersama. Perhatian serius terhadap tata kelola lingkungan dan penanganan bencana harus menjadi prioritas agar kejadian serupa tidak terulang," cetusnya.

Anggota DPR Fraksi PKB Zainul Munasichin juga meminta Pemprov Jabar meninjau ulang izin tambang di Kabupaten Sukabumi. Pasalnya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 mendelegasikan kewenangan soal Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah Pusat kepada Pemprov.

"Ekosistem rusak, hutan juga rusak. Ini harus dievaluasi dan perlu menjadi perhatian," tegasnya.

Zainul mengaku telah mendatangi sejumlah titik terdampak banjir di Kabupaten Sukabumi. Pihaknya banyak mendapat banyak masukan dan aspirasi dari masyarakat soal bencana tersebut.

"Mereka banyak mengelukan tentang maraknya pertambangan di wilayah Selatan Sukabumi. Kegiatan itu diduga menjadi pemicu bencana hidrometeorologis, termasuk banjir bandang kemarin," ungkapnya.

Terpisah, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan langsung dan melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan di Sukabumi, yang terindikasi memperparah kondisi bencana banjir. Dia juga sudah menerima sejumlah laporan soal aktivitas tersebut.

"Saya mendapat laporan, ada beberapa aktivitas tambang dan kegiatan di kawasan hutan yang tidak ramah lingkungan. Kami akan cek kembali kapasitas lahannya, termasuk pengawasan dan penegakan hukum bila diperlukan," ucapnya.

Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), lanjut Hanif, ancaman hidrometeorologi diperkirakan terus meningkat seiring dengan tingginya curah hujan. Sebab itu, dia mengimbau masyarakat tetap siaga, terutama dalam menjaga kesehatan lingkungan.

Sementara, Pejabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi izin tambang di Kabupaten Sukabumi.

Dia memastikan, Pemprov Jabar akan mencabut izin perusahaan yang tidak menjalankan atau melanggar aturan, termasuk yang tidak melakukan pelestarian kembali.

"Kenapa diberikan izin, apakah betul menjaga lingkungan? Kan bisa kami cek. Prinsipnya, kami akan menegakkan aturan. Kalau ada melanggar (aturan), ya kami cabut izinnya," tegas dia.

Senada, Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengungkapkan, pihaknya telah menginstruksikan para Kepala Desa agar lebih cermat sebelum memberikan rekomendasi kepada investor tambang. Dia pun akan melakukan pengecekan dan pengawasan aktivitas para perusahaan tambang yang ada di wilayahnya.

"Sebab, dasar awal perizinan untuk melakukan kegiatan itu, ada di desa. Rekomendasi yang muncul, baik ke gubernur maupun kementerian, setelah proses di bawah (desa)," cetusnya.

Perbincangan tentang kerusakan lingkungan, akibat aktivitas tambang di Sukabumi ramai diperbincangkan netizen di media sosial X.

"Kalau mau bukti kerusakan lingkungan, cari saja tambang sekitar Geopark Ciletuh Sukabumi, dijamin anda-anda tercengang," cuit akun *@Risqimuslim*.

"Inilah bukti keadaan sekitar sungai Cikaso, Sukabumi setelah banjir bandang. Banjir bandang yang menerjang Sukabumi di sebabkan oleh aktivitas pertambangan," tulis akun *@txtdarisukabumi*, dengan menautkan video tentang kondisi wilayah DAS Cikaso pasca bencana.

"Kalau melihat dari dekat bagaimana terjadinya bencana hidrometeorologi di Sukabumi, mulai dari banjir, longsor, sampai pergeseran tanah, kita akan sama-sama tahu, apa faktor utamanya? TAMBANG," timpal akun *@thoriqatuna*.

Akun *@Rizal010102* memiliki pendapat berbeda. Dia menilai, aktivitas tambang di Sukabuni, bukan satu-satunya pemicu bencana. Sebab, ada juga alih fungsi lahan untuk pemukiman.

"Kita harus lihat secara keseluruhan. Kalau kita perhatikan, daerah Sukabumi sampai Bogor, dulu mempunyai banyak lahan sawah atau ladang. Sekarang, lahan-lahan itu banyak yang disulap jadi rumah mewah atau vila," imbuhnya. ■ SSL